

**IMPLEMENTASI PROGRAM PERCEPATAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DESA DAN KELURAHAN (PPIDK) KASUS DESA
KUALA PANDUK KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2013-2014.**

Oleh :

Tengku Rajib Huda

E-mail: tengkurajib30@yahoo.co.id

Pembimbing: Dr. Khairul Anwar, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau
Kampus Bina Widya, H.R. Soebrantas Street Km 12,5 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

The problem in this study is whether the Group of Governmental Kuala Panduk Village as a contractor at the village level and BPMPD Pelalawan as policy makers, understand and can implement this program in accordance with the instructions and the extent of public support in the review of social, cultural, political and economic factors a factor that into effect in practice. Theoretical concept that is in use is policy and policy implementation.

This research uses descriptive method. In collecting the data, researchers use interviewing techniques, observation and documentation. These results indicate that the Infrastructure Development Acceleration Program Implementation Village and Village (PPIDK) Case Kuala Panduk Village, Pelalawan Regency Year 2013 to 2014 have not been up to equitable development, increase revenue and employment for the people of the village of Kuala Panduk due to budget constraints.

Keywords: Policy, PPIDK program, Policy Implementation

PENDAHULUAN

Sebagaimana yang diamatkan oleh Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan

secara berkelanjutan. Sebagai konsekuensinya, desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu kepada arah skala prioritas pembangunan tingkat Kabupaten. Maka desa diberikan wewenang dan fungsi untuk merencanakan, melaksanakan, pengawasan yang diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui musyawarah dalam menetapkan

prioritas, program, kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat.

Kabupaten Pelalawan telah melangkah menuju kepada arah otonomi desa sebagai bagian dari proses reformasi yang diharapkan dapat memperbaiki dan mempercepat proses pencapaian cita-cita untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Disadari pula bahwa kesejahteraan akan sangat ditentukan oleh daya saing tatanan sosial masyarakat desa itu sendiri. Kecenderungan perkembangan untuk meningkatkan pemahaman daya saing dan tatanan sosial masyarakat dipengaruhi oleh sumber daya manusia, sumber daya alam, letak geografis daerah setempat dan arah kebijakan pembangunan pemerintah.

Merujuk kepada Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pelalawan Tahun 2011 – 2016, meluncurkan 7 (tujuh) program pokok yaitu ;

1. ***Pelalawan Sehat*** bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan.
2. ***Pelalawan Cerdas*** bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan diarahkan kepada pemenuhan pendidikan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum.
3. ***Pelalawan Terang*** bertujuan untuk pemenuhan elektabilitas listrik sampai ke pelosok desa.
4. ***Pelalawan Eksotis*** bertujuan pengembangan fenomena alam dan warisan Kerajaan Pelalawan untuk

dijadikan sebagai ikon tujuan pariwisata.

5. ***Pelalawan Lancar*** bertujuan untuk peningkatan pembangunan infrastruktur jalan dalam upaya membuka isolasi desa terpencil dan tertinggal.
6. ***Pelalawan Makmur*** bertujuan untuk mencukupi tersedianya ketahanan pangan dan gizi secara merata, bermutu, bergizi, seimbang dan aman.
7. ***Pelalawan Inovatif*** bertujuan pemanfaatan teknologi mendukung pemenuhan kebutuhan dasar yang berkualitas dan proses pembangunan yang berkelanjutan.

Kebijakan ini menitikberatkan untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam percepatan pembangunan infrastruktur dengan mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pelalawan untuk Desa Kuala Panduk pada Tahun 2013 sebesar Rp. 500.000.000,- dan Tahun 2014 sebesar Rp. 500.000.000,- . Dalam pelaksanaan program PPIDK Desa Kuala Panduk dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan, dikerjakan melibatkan peran serta aktif masyarakat setempat. Hal ini juga dapat menunjang kegiatan ekonomi kerakyatan, berfungsi mengatasi pengangguran dan membuka kesempatan kerja serta meningkatkan partisipasi aktif masyarakat. Pengelolaan dana dengan membentuk organisasi tim Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang ditunjuk berdasarkan musyawarah masyarakat desa yang bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran, keberlanjutan manfaat infrastruktur

yang telah terbangun. Setelah berjalan dua tahun, kegiatan ini telah menunjukkan hasil yang dicapai. Program unggulan ini untuk mengejar ketertinggalan dan mempercepat pemerataan infrastruktur pedesaan.

Sebagai gambaran awal bahwa Desa Kuala Panduk adalah sebuah desa yang terletak di bantaran sungai Kampar, yang termasuk dalam 44 desa tertinggal di Kabupaten Pelalawan, dengan luas wilayah desa 234 KM² pada lahan gambut. Berjumlah penduduk 1.514 jiwa terdiri dari 799 jiwa laki-laki dan 715 jiwa perempuan dalam 347 rumah tangga 100% beragama Islam. Kondisi rumah penduduk permanen 1 unit, semi permanen 3 unit dan rumah panggung 344 unit. Mata pencaharian penduduk mayoritas adalah petani, pekebun, peternak dan nelayan, (**Monografi Desa Kuala Panduk, 2014**).

Sejak pembangunan jalan Lintas Bono yaitu pembangunan jalan menembus desa-desa pesisir sungai Kampar, tentunya terjadi perubahan dalam tatanan kehidupan. Jalan telah berhasil membuka isolasi keterisoliran. Kini tatan kehidupan masyarakat telah menapak berajak menuju arah kemakmuran, mereka mulai menatap jalan kehidupan baru dalam merubah nasib yang telah dijalani dari turun temurun. Walaupun boleh dikatakan masyarakat bergerak untuk merubah kehidupan dengan cara mereka sendiri-sendiri.

Untuk memanfaatkan dana Program PPIDK Desa Kuala Panduk Tahun 2013-2014, berdasarkan hasil musyawarah masyarakat dititik-beratkan kepada pembangunan semenisasi jalan desa. Kondisi jalan desa selama ini adalah jalan tanah

keadaan becek dan berlumpur pada musim hujan atau banjir air pasang besar dan berdebu pada musim kemarau.

Jalan merupakan faktor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi untuk menuju perubahan yang lebih maju dan sejahtera. Pembangunan jalan dapat memperlancar akselerasi barang dan orang, sehingga produk pertanian dan hasil ikan tangkapan masyarakat dapat dipasarkan ke luar desa. Sangat dirasakan oleh masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hasil ikan tangkapan di sungai.

Prinsip dan pendekatan dalam pelaksanaan program PPIDK Tahun 2013 dan 2014 adalah sebagai berikut :

1. *Acceptable* yaitu pemilihan kegiatan berdasarkan musyawarah sehingga dapat diterima dan didukung oleh masyarakat. Untuk pemilihan lokasi dan penentuan solusi teknis, mekanisme pelaksanaan, pengadaan alat dan bahan serta mekanisme pengelolaan prasarana desa terbangun.
2. *Transparent* yaitu penyelenggaraan kegiatan dilakukan bersama masyarakat secara terbuka dan diketahui oleh semua unsur masyarakat melalui penyediaan media informasi akurat mudah di akses masyarakat.
3. *Accountable* yaitu penyelenggaraan kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan dalam hal ketepatan sasaran, waktu, pembiayaan dan mutu pekerjaan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
4. *Sustainable* yaitu penyelenggaraan kegiatan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat secara

berkelanjutan yang ditandai dengan adanya pemanfaatan, rehabilitasi serta renovasi sederhana dan pengelolaan prasarana dan sarana desa yang mandiri oleh masyarakat.

5. Program ini bersifat bantuan keuangan khusus kepada desa sesuai usulan masyarakat yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pelalawan.
6. Keswadayaan masyarakat menjadi faktor utama dalam keberhasilan pembangunan, baik melalui keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan hasil dari pembangunan.
7. Penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam upaya mendorong sinergi antara pemerintahan, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan permasalahan kemiskinan.
8. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas mengacu kepada standar teknis yang diarahkan oleh Tim Pembina Kabupaten, Tim Pengendali Kecamatan dan Pendampingan Tingkat Desa.

Menurut penjelasan dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembangunan desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan berkelanjutan. Konsekuensinya, desa

menyusun perencanaan pembangunan sesuai fungsinya merencanakan, dan melaksanakan, pengawasan yang diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa melalui musyawarah menetapkan prioritas, program, kegiatan sesuai kebutuhan masyarakat.

Sejalan dengan tujuan pembangunan yang berbasiskan kepada otonomi desa, Pemerintah Kabupaten Pelalawan telah meluncurkan program strategis adalah pembangunan infrastruktur yang memegang peranan penting dalam kemajuan suatu daerah, meliputi sarana dan prasarana transportasi, air bersih, listrik dan jasa telekomunikasi menjadi hal mendasar yang harus dipenuhi agar seluruh aktivitas pembangunan di suatu daerah dapat berjalan dengan baik. Sasaran yang ingin di capai adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang maju dan mandiri, peningkatan partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan untuk percepatan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan. Hal ini dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pelalawan Tahun 2011-2016 (**RPJMD Kabupaten Pelalawan Tahun 2011-2016**).

Melihat Monografi Desa Kuala Panduk Kabupaten Pelalawan Tahun 2014 di tinjau dari sudut kemampuan ekonomi masyarakat. Untuk gambaran awal bahwa adalah sebuah desa yang terletak di bantaran sungai Kampar,

yang termasuk dalam 44 desa tertinggal dalam Kabupaten Pelalawan, dengan luas wilayah desa 234 KM² pada lahan gambut. Berjumlah penduduk 1.514 jiwa terdiri dari 799 jiwa laki-laki dan 715 jiwa perempuan dalam 347 rumah tangga 100% beragama Islam. Kondisi rumah penduduk permanen 1 unit, semi permanen 3 unit dan rumah panggung 344 unit. Mata pencaharian penduduk mayoritas adalah petani, pekebun, peternak dan nelayan, (**Monografi Desa Kuala Panduk, 2014**).

Bila di tinjau 10 (sepuluh) tahun kebelakang berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan Tahun 2003 di tinjau dari sudut yang sama terhadap kemampuan ekonomi masyarakat dan infrastruktur jalan. Jumlah penduduk 1.555 jiwa terdiri dari 807 jiwa laki-laki dan 748 jiwa perempuan dalam 331 KK. Kondisi lantai rumah penduduk dari kayu/papan 329 rumah dan atap seng 289 rumah serta 42 rumah atap daun. Sedangkan kondisi jalan tanah dan sarana transportasi air perahu bermesin 242 buah dan perahu tak bermesin 300 buah. Mata pencaharian penduduk adalah petani, pekebun, dan nelayan, (**Kec. Teluk Meranti Dalam Angka Tahun 2004**).

Menurut Tenas Effendy dalam Tunjuk Ajar Melayu (2004), mengemukakan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam tunjuk ajar Melayu adalah mengutamakan persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi semangat kegotong-royongan, serta mengekalkan tenggang rasa di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Mengacu prinsip bahwa pada hakekatnya manusia adalah bersaudara, bersahabat, dan

berkasih sayang maka tunjuk ajar yang berkaitan dengan persatuan dan kesatuan memupuk semangat gotong royong dan tenggang rasa senantiasa hidup dan diwariskan secara turun-temurun.

Grindle dalam Sujianto (2008:31) mengarahkan implementasi kebijakan bukan sekedar berhubungan dengan mekanisme penjabaran atau operasional dari keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu yaitu menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Menurut Grindle dalam Nugroho (2004:59) implementasi sebagai rangkaian antara tujuan kebijakan dan hasil-hasil kegiatan pemerintah, karena itu implementasi kebijakan membutuhkan adanya sistem pelaksanaan kebijakan cara yang diterjemahkan kedalam tindakan-tindakan program untuk mencapai tujuan akhir yang ditetapkan oleh kebijakan.

Grindle dalam Sujianto (2008:46) mengemukakan bahwa setidaknya ada tiga faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yaitu:

1. Kejelasan tujuan-tujuan program dan tingkat konsensus diantara pelaksana atas tujuan-tujuan tersebut;
2. Tingkat perubahan dari kebiasaan-kebiasaan lama yang dikehendaki program;
3. Tipe-tipe orang yang memperoleh manfaat dan klien terbatas, yaitu orang dan kelompok yang menjadi target implementasi.

Implementasi kebijakan haruslah menampilkan keefektifan dari

kebijakan itu sendiri. Pada dasar prinsipnya ada “empat tepat” yang perlu dipenuhi dalam hal keefektifan implementasi kebijakan, yaitu: a). Ketetapan kebijakan; b).Ketetapan pelaksanaan kebijakan; c).Ketetapan target kebijakan; d).Ketetapan lingkungan kebijakan.

Sedangkan *Context of Implementation* (lingkungan kebijakan) menurut **Grindle** dalam Nawawi (2009:142) mencakup:

- a. *Power, Interest and Strategis of Actor Involved* (kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor-aktor yang terlibat). Dalam suatu kebijakan perlu diperhitungkan pula kekuatan dan kekuasaan kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang maka sangat besar kemungkinan program yang hendak dijalankan tidak berhasil.
- b. *Institution and Regime Characteristic* (karakteristik lembaga dan rezim berkuasa). Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilan, maka pada bagian karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.
- c. *Compliance and Responsiveness* (pemenuhan dan daya tanggap) Hal ini yang dirasakan penting dalam proses pelaksanaan kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada point

ini adalah sejauh mana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan.

METODE PENELITIAN.

Jenis penelian ini menggunakan metode dengan jenis penelitian deskriptif, yang bertujuan menjelaskan dan menggambarkan keadaan berdasarkan fakta-fakta dalam implementasi program percepatan pembangunan infrastruktur desa dan keluarah Data untuk menjelaskan suatu masalah dengan batasan terperinci, pengambilan data yang benar dan akurat serta menyertakan berbagai sumber informasi yang terpercaya. Penulis menguraikan penulisan ini dengan cara deskriptif yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang dikelilingi dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan atau subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang benar dan terpercaya.

Untuk melengkapi data penelitian ini maka penulis menggunakan informasi dari berbagai kalangan masyarakat yang dinilai mampu memberikan masukan yang akurat dan memadai berkaitan dengan Ementasi Program PPIDK Kasus Desa Kuala Panduk Kabupaten Pelalawan Tahun 2013-2014.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.Profil Kabupaten Pelalawan.

Menurut **Tenas Effendy (2002)**, menyatakan bahwa sejarah panjang yang diambil dari kilasan Kerajaan Pelalawan yang sekarang menjadi Kabupaten Pelalawan, berawal dari Kerajaan Pekantua yang didirikan oleh Maharaja Indera (sekitar tahun 1380

M). Beliau adalah bekas orang besar Kerajaan Temasik (Singapura), yang mendirikan kerajaan ini setelah Temasik dikalahkan Majapahit dipenghujung abad XIV. Sedangkan Raja Temasik terakhir bernama Prameswara mengundurkan dirinya ke Tanah Semenanjung, kemudian mendirikan Kerajaan Melaka.

Maharaja Indera (1340-1420 M) membangun Kerajaan Pekantua pada tempat yang bernama Pematang Tuo dan kerajaannya dinamakan Pekantua. Setelah mangkat Maharaja Indera digantikan oleh putranya Maharaja Pura (1420-1445 M) yang terus mengembangkan Pekantua dengan membangun Bandar Tolam di hilir Pekantua, untuk meningkatkan perannya dalam pelayaran di perairan Selat Melaka.

Pada akhirnya menjadi Raja Pekantua (1505-1511 M) dan pada saat itu diumumkan bahwa Kerajaan Pekantua namanya diganti menjadi Kerajaan Pekantua Kampar. Dalam sejarah telah tercatat 30 kali pergantian pucuk tahta kerajaan. Sejarah panjang Kerajaan Pelalawan Tahun 1380 - 1945. Raja yang terakhir adalah Tengku Said Harun (1941-1946 M)

1. Profil Desa Kuala Panduk.

Tempat penelitian di Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Desa ini termasuk dalam 44 desa tertinggal di Kabupaten Pelalawan, dengan luas wilayah desa 234 KM² pada lahan gambut. Berjumlah penduduk 1.514 jiwa terdiri dari 799 jiwa laki-laki dan 715 jiwa perempuan dalam 347 rumah tangga. Mata pencaharian penduduk mayoritas

adalah petani, pekebun, peternak dan nelayan, (**Monografi Desa Kuala Panduk, 2014**).

2. Visi Dan Misi Kab. Pelalawan.

a. Visi.

Kabupaten Pelalawan mempunyai visi adalah "Terwujudnya Kabupaten Pelalawan yang maju dan sejahtera melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang didukung oleh pertanian yang unggul dan industri yang tangguh dalam masyarakat yang beradab, beriman, bertaqwa dan berbudaya Melayu Tahun 2030".

b. Misi. untuk mencapai visi adalah :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan dengan terpenuhinya kebutuhan dasar, sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, bermartabat dan berbudaya.
2. Menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pembangunan usaha ekonomi kerakyatan.
3. Meningkatkan hasil dan mutu pertanian melalui pemanfaatan teknologi berbasis agroindustri dan agrobisnis serta pengelolaan hutan yang lestari.
4. Menciptakan dan membina industri yang mampu menghasilkan produk yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan.
5. Peningkatan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan dan memfungsikan lembaga keagamaan sebagai wadah pembinaan umat.

3. Tujuan Program PPIDK.

Secara konseptual program PPIDK bertujuan untuk mewujudkan

masyarakat yang mampu melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa secara mandiri berkelanjutan melalui proses pemberdayaan masyarakat dalam upaya mendukung pencapaian visi di masa depan, diterjemahkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas pemerintah kecamatan, desa dan masyarakat sinergi dalam rangka mewujudkan infrastruktur yang layak dan berkelanjutan;
2. Meningkatkan akses desa dan masyarakat miskin terhadap kebutuhan ketersediaan layanan infrastruktur melalui pelibatan dalam proses pelaksanaan program;
3. Mengurangi kemiskinan dan memperkuat implementasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di tingkat kecamatan dan desa/kelurahan;
4. Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur di desa melalui
 - Meningkatkan akses pemasaran melalui membuka isolasi daerah;
 - Menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat;
5. Mendorong penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang dapat diterima oleh masyarakat dengan cara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.
6. Meningkatkan kemampuan masyarakat membangun infrastruktur, dan menimbulkan kesadaran untuk memelihara infrastruktur.

4. Organisasi Program PPIDK.

1. Tim Pembina Tingkat Kabupaten sebagai koordinator tim pelaksana pekerjaan untuk mengarahkan,

pengawas, dan pengendali dari semua tahap kegiatan yang berkaitan dengan penyelesaian pendamping ditingkat kabupaten;

2. Tim Pengendali Kecamatan bertugas untuk melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program tingkat desa.
3. Kepala Desa selaku Tim Pengendali Kecamatan di tingkat desa, bertugas menyelenggarakan program.
4. Kelompok Swadaya Masyarakat adalah organisasi masyarakat yang bertugas melaksanakan program mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan fisik dan pemeliharaan.

5. Pengawasan.

Pengawas pelaksanaan program PPIDK adalah proses yang dilakukan secara terus menerus sepanjang tahap program mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan fisik sampai dengan tahap paska pelaksanaan fisik. Pihak-pihak terkait selain masyarakat desa yang dapat dan berhak melakukan pengawasan adalah:

- a. Kelompok pemanfaatan dan pemeliharaan (KPP)
- b. Pemerintah Desa/Kelurahan
- c. Pendamping Desa
- d. Pengawas di Tingkat Kecamatan
- e. Pengawas di Tingkat Kabupaten
- f. Inspektorat Kabupaten Pelalawan..

6. Pelaporan.

a. Jalur Pelaporan Struktural, Pelaporan ini adalah pelaporan yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari KSM, Tim Pengendali Kecamatan dan Tim Pembina Kabupaten yang kemudian disampaikan kepada

Pemerintah Kabupaten Pelalawan, diuraikan sebagai berikut:

b. Jalur Pelaporan Fungsional, Pelaporan yang dilaksanakan oleh pendamping secara berjenjang mulai dari Pemdamping Desa, Pendamping Kecamatan sampai dengan Tim Pendamping Kabupaten.

7. Evaluasi.

Secara umum evaluasi dilakukan untuk mengukur kinerja pelaksanaan berdasarkan penilaian dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Adapun indikator-indikator yang menjadi dasar penilaian adalah a).Ketetapan Prosedur Program; b).Ketepatan Waktu Pelaksanaan Program; c). Ketetapan Tujuan dan Sasaran Program; c).Ketetapan Pelaksanaan Kegiatan Fisik; d).Partisipasi Masyarakat; dan e).Swadaya Masyarakat.

8. Konten Perubahan Pelaksanaan Kebijakan Program PPIDK.

Pada hakekatnya Program PPIDK dalam rangka percepatan dan pemerataan pembangunan infrastruktur desa serta membuka terisolasi dengan memberdayakan partisipasi masyarakat untuk mengentaskan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan. Selain itu, dimaksudkan pula untuk memperkuat implementasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good govermanance*) di tingkat kecamatan dan desa. Selain itu ditujukan untuk menumbuhkan semangat gotong-royong ditengah masyarakat pedesaan yang telah memudar.

Dalam kenyataan dilapangan ternyata 118 desa/kelurahan se Kabupaten Pelalawan mendapatkan alokasi dana sama besarnya dan tidak mempertimbangkan antara desa tertinggal dengan desa yang telah maju. Kesenjangan ini juga dapat di lihat nyata bahwa kelurahan di ibukota kabupaten dan kecamatan mendapatkan pembangunan infrastruktur jalan dari instansi lain baik dari kabupaten maupun dari provinsi. Desa-desa terisolir yang sangat jarang mendapatkan pembangunan infrastruktur dari instansi lain.

Berdasarkan pelaksanaan identifikasi di lapangan, maka dapat dijelaskan bahwa perubahan tatanan kemasyarakatan dari pelaksanaan kebijakan program PPIDK Desa Kuala Panduk Tahun 2013-2014, ditinjau dari aspek sosial budaya, aspek peningkatan ekonomi dan aspek politik tingkat desa untuk masing-masing komponen yang bersangkutan.

a. Aspek Pemerataan

Pembangunan Sampai ke Desa.

Hasil pekerjaan semenisasi jalan program PPIDK Tahun 2013-2014 Desa Kuala Panduk sepanjang 970 meter, lebar 2,5 meter dan tebal 18 CM. Hanya baru mencapai 33,74 % dari seluruh panjang jalan desa 2.875 meter, masih dibutuhkan lagi 1.905 meter untuk pemerataan tingkat desa. Dari hasil survey dilapangan sebanyak 20 orang masyarakat yang dilakukan wawancara, maka diketahui penilaian terhadap pemerataan pembangunan sampai ke desa, secara umum memberikan tanggapan masih terdapat kesenjangan antara daerah tertentu dengan Desa Kuala Panduk. Pada hal perkampungan ini di bantar sungai

yang selalu tergenang oleh air pasang surut membuat jalan becek dan berlumpur, dan pada musim kemarau kondisi jalan berdebu dan debu pun berterbangan mengotori rumah penduduk yang berada di pinggir jalan.

b. Aspek Penggunaan Anggaran dan Pencapaian Hasil.

Bila di tinjau secara kasat mata terhadap hasil pekerjaan semenisasi jalan program PPIDK Tahun 2013-2014 Desa Kuala Panduk sepanjang 970 meter, lebar 2,5 meter dan tebal 18 CM, dengan alokasi anggaran Rp. 1.000.000.000,- . Dari hasil penelitian dilapangan pada masyarakat yang dilakukan wawancara, maka diketahui penilaian terhadap penggunaan anggaran pembangunan semenisasi jalan sangat maksimal.

c. Aspek Kesesuaian Antara Perencanaan dan Pelaksanaan.

Diketahui bahwa penilaian oleh masyarakat terhadap kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan kegiatan, hanya separuh yang menyatakan baik dan sesuai antara perencanaan dengan pelaksanaan dan separuhnya lagi masyarakat menilai kurang sesuai antara perencanaan dengan pelaksanaan.

d. Pengelolaan dan Pengawasan Oleh Masyarakat.

Dengan anggaran Satu Milyar Rupiah selama 2 tahun pelaksanaan kegiatan Program PPIDK membangun semenisasi jalan desa. Dari hasil survey dilapangan sebanyak 20 orang masyarakat yang dilakukan wawancara, maka diketahui penilaian terhadap pengelolaan, pengendalian

dan pengawasan oleh masyarakat atas hasil pekerjaan belum maksimum.

e. Aspek Peningkatan Pendapatan Dari Kegiatan.

Dari hasil penelitian dilapangan diketahui bahwa peningkatan pendapatan ekonomi dari hasil pekerjaan semenisasi jalan Desa Kuala Panduk kegiatan Program PPIDK 2013-2014, tidak memberikan perubahan yang mendasar disebabkan anggaran untuk upah kerja atau uang lelah hanya sedikit dan sebagian besar anggaran terserap untuk pembelian bahan material bangunan yang relatif mahal dipengaruhi faktor transportasi.

9. Konteks Dukungan Masyarakat Terhadap Program PPIDK.

Dengan melalui tata cara identifikasi faktor penentu akan lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas kegiatan-kegiatan pembangunan infrastruktur mengingat keterbatasan dana yang tersedia oleh pemerintah bila dibandingkan dengan kebutuhan mendasar terhadap infrastruktur di Desa Kuala Panduk. Ditinjau dari aspek sosial budaya, aspek peningkatan ekonomi dan aspek politik tingkat desa untuk masing-masing komponen yang bersangkutan dari berbagai aspek adalah sebagai berikut ;

a. Aspek Menumbuhkan Semangat Gotong.

Kearifan masyarakat Melayu pesisir sungai pada masa dahulunya telah mempunyai sikap membangun kebersamaan gotong-royong dan tenggang rasa serta mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap kampung halamannya. Diketahui bahwa penumbuhan kembali semangat gotong royong dan sifat tenggang rasa

kepedulian bagi masyarakat dapat dikatakan baik dan memberikan dampak yang positif. Akan tetapi karena responden diambil dari berbagai tingkatan kehidupan masyarakat, tentu masih ada segelintir suara-suara masyarakat yang menyatakan kurang menumbuhkan semangat gotong-royong dan sifat tenggang rasa. Hal ini berpulang kepada sikap mental dari individu-individu yang memiliki sifat tenggang rasa dan kepedulian kepada pembangunan negeri sendiri.

b. Aspek Partisipasi dan Kerjasama Masyarakat.

Tingkat partisipasi dan kerjasama secara individu untuk ikut serta memberikan sumbangsih tenaga dan berkerja dalam pelaksanaan fisik pembangunan semenisasi jalan, ataupun dalam bentuk sumbangan lainnya. Bentuk partisipasi dan kerjasama masyarakat dalam mendukung pelaksanaan pekerjaan ini dapat dibagi dalam 4 (empat) kategori yaitu ;

- 1). Masyarakat yang terlibat langsung dalam pekerjaan fisik bangunan dan mendapatkan upah sesuai standar yang telah ditentukan;
- 2). Masyarakat yang berpartisipasi dalam bentuk fikiran dan gagasan yang berperan aktif dalam musyawarah perencanaan, pengawasan dan menerima hasil pekerjaan, kelompok ini tidak mendapatkan uang lelah;
- 3). Masyarakat yang tidak termasuk dalam kategori a dan b, tetapi selalu memberikan bantuan tenaga dan material untuk mensukseskan pekerjaan fisik bangunan, dan ;

- 4). Kaum ibu-ibu yang selalu memberikan makanan dan minuman baik untuk para pekerja upah harian maupun kepada masyarakat yang bergotong-royong untuk keperluan kelancaran pekerjaan bersifat fisik.

c. Aspek Tingkat Kepuasan Masyarakat.

Penilaian masyarakat secara umum lebih banyak yang mengatakan dan merasakan kepuasan dan gembira menilai baik serta sangat bermanfaat dengan adanya pembangunan infrastruktur jalan semenisasi. Selain itu seluruh masyarakat mengaharapkan kegiatan ini dilaksanakan secara terus menerus sampai keseluruhan panjang jalan desa dapat disemenisasikan.

d. Aspek Membuka Lapangan Kerja.

Hakekatnya untuk membuka lapangan kerja bagi masyarakat miskin, hampir miskin dan kaum perempuan dalam upaya meningkatkan pendapatan dari pelaksanaan program PPIDK Tahun 2013-2014 Desa Kuala Panduk. Diketahui terhadap upaya untuk membuka lapangan kerja sesuai sasaran dalam upaya peningkatan pendapatan, namun kenyataan dilapangan pelaku pekerja dari kelompok tertentu. Penambahan penghasilan bagi masyarakat yaitu yang dilibatkan dalam bekerja dengan menerima upah kerja dan yang menyediakan kayu cerocok seharga RP.2.500,- per batang.

e. Aspek Sasaran Peningkatan Kesejahteraan.

Dari hasil penelitian dilapangan diketahui kelompok masyarakat yang dilibatkan dalam pekerjaan fisik

berkisar 15 sampai 20 orang, hal ini disebabkan oleh keterbatasan anggaran dan volume pekerjaan yang sedikit sehingga tidak dapat menampung seluruh masyarakat pencari kerja yang ingin melibatkan diri turut serta dalam proses pengerjaan fisik.

11. Hambatan Dalam Pelaksanaan Program PPIDK.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui beberapa hambatan dalam pelaksanaan program PPIDK Desa Kuala Panduk Kabupaten Pelalawan Tahun 2013-2014, antara lain yaitu :

1. Kurangnya anggaran untuk melaksanakan semenisasi jalan utama perkampungan Desa Kuala Panduk sehingga baru tercapai 970 meter atau 33,74% dari panjang seluruhnya 2.875 meter.
2. Pembangunan jalan semenisasi belum maksimal ukuran lebar hanya 2,5 meter, sulit bagi mobil untuk berselisih (berpapasan) di jalan maka terpaksa mencari tempat yang lapang.
3. Tingginya biaya material bangunan yang disebabkan oleh jauhnya letak Desa Kuala Panduk dari toko bangunan. Seperti semen, paku, dan peralatan tukang dari Pangkalan Kerinci, serta Pasir dan Kerikil dari Indragiri Hulu dan Tanjung Balai Karimun.
4. Konstruksi pembangunan jalan semenisasi memerlukan perlakuan khusus yaitu pakai kayu cerocok dan permukaan tanah di alas dengan terpal tebal.
5. Kondisi tanah yang lembut dan selalu terendam membuat daya tahan bangunan jalan semenisasi mudah rusak.

6. Terjadinya cemburu sosial bagi masyarakat yang tidak mendapatkan pekerjaan dalam pembangunan jalan semenisasi, sehingga pendapatan tidak merata.
7. Adanya sekelompok masyarakat merasa kecewa karena jalan semenisasi tidak sampai ke depan rumah tempat tinggalnya, sehingga mereka ini rasa kepemilikan dan kepedulian terhadap jalan semenisasi ini rendah.
8. Karena keterbatasan anggaran berakibat volume pekerjaan tidak sebanding dengan besarnya harapan masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka.
9. Adanya penilaian masyarakat bahwa Program PPIDK Tahun 2013-2014 di Desa Kuala Panduk belum mengimbangi kesenjangan pembangunan di daerah lain dalam satu Kabupaten Pelalawan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap implementasi program percepatan pembangunan infrastruktur Desa Kuala Panduk Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan desa dengan semenisasi baru terpenuhi mencapai 970 meter atau 33,74 % dari seluruh panjang jalan desa 2.875 meter. Kekurangan sepanjang 1.905 meter untuk dilaksanakan semenisasi jalan, hal ini belum memenuhi azas pemerataan pembangunan.
2. Pemerintah Kabupaten Pelalawan perlu melanjutkan program PPIDK untuk memenuhi azas pemerataan

- pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan kehidupan serta mengurangi rasa kecemburuan sosial bagi masyarakat desa.
3. Kondisi jalan darat menuju lokasi Desa Kuala Panduk belum resesatif selalu keadaan jelek dan rusak, sehingga membuat harga material bangunan menjadi tinggi yang mengakibatkan volume hasil pekerjaan tidak maksimal.
 4. Memperhatikan dan merangkum hasil wawancara dengan masyarakat terhadap program PPIDK Tahun 2013-2014 Desa Kuala Panduk, yang menyatakan baik dan puas lebih kurang separuh, dan separuhnya lagi menyatakan cukup dan kurang. Hal ini mengindikasikan bahwa dua tahun pelaksanaan pekerjaan semenisasi jalan desa, belum begitu memuaskan masyarakat setempat secara umum.
 5. Melalui program PPIDK Tahun 2013-2014 telah menumbuhkan kembali semangat gotong-royong yang telah mulai memudar di tengah-tengah masyarakat pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Budi Winarno, 2005. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Caps, Yogyakarta.
- Daldjoeni, N. 1986. *Geografi Kota dan Desa*, PT. Alumni, Bandung.
- Effendy, T. 2004. *Tunjuk Ajar Melayu*, Badan Kajian dan Pengembangan Budaya Melayu kerjasama dengan Penerbit Adicita Karya Nusa. Yogyakarta.
- , 2002. *Dari Pekan Tua ke Pelalawan*. Pemerintah

Kabupaten Pelalawan, Pangkalan Kerinci.

Grindle, Merille S, 1980. *Politik and Policy Implementation in The Third World*, Princeton University Press, New Jersey.

Nugroho. D, Riant, 2004. *Kebijakan Publik*, Gramedia, Jakarta,

Siagian, P.Sondang, 2002. *Teori Pengembangan Organisasi*, Bumi Aksara, Jakarta.

Wahab, Abdul, 2008. *Analisis Kebijakan dan Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta.

Skripsi:

Mahrifatullah, Tohid, 2015. *Kebijakan Pembangunan Perkantoran Bhakti Praja Kabupaten Pelalawan*. Pekanbaru: Universitas Riau